



Diploması Pertahanan Malaysia dalam Upaya Mitigasi Di Laut Cina Selatan

(Malaysia's Defense Diplomacy in Mitigation Efforts in the South China Sea)

Ahmad Naufal, Deny Wirawan, Rafiq Purnama,

Roy Limbong, Soegeng, Wasis Waskito

Universitas Pertahanan Indonesia

Corresponding Author: wasis.waskito@outlook.com

Abstract

Foreign Policy is an important instrument of the state in the context of international relations for a country. The strong principle of Malaysian policy is national sovereignty and the right of the State to control its internal affairs. Malaysia views regional cooperation as the cornerstone of a foreign policy that prioritizes ASEAN's security and security and tries to strengthen relations with other countries. The problem in this research is how are the foreign policy efforts, mitigation efforts carried out by Malaysia in dealing with disputes in the South China Sea and the problem of non-traditional crimes in Southeast Asian waters. The results of research on the settlement of South China Sea policies on regional disputes are resolved in various ways, including diplomacy, which are resolved in international courts. The Spratlys and other islands in the South China Sea as Malaysia's EEZ have long maintained a humble approach towards accepting in the South China Sea. positive relations with China due to maintaining a strong economy, and the desire for a balance of power in the South China Sea region.

Keywords: Foreign policy, Malaysia, South China Sea, Defense Diplomacy



1. Pendahuluan

Kebijakan luar negeri merupakan instrumen penting bagi negara dalam konteks hubungan internasional. Kebijakan luar negeri adalah tujuan sebuah negara dalam menjalin hubungan dengan aktor lain yang berada di luar wilayah kedaulatannya (Kegley, 1999). Bentuk dari kebijakan luar negeri sangat bervariasi tergantung pada kondisi yang sedang dihadapi oleh suatu negara. Struktur internasional yang anarki turut ikut mewarnai kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan oleh negara. Dalam struktur internasional yang sifatnya anarki tidak ada yang akan menolong unit (negara) kecuali unit itu sendiri (*self-help*). Dalam sistem *self-help* unit akan habis-habisan dalam usahanya untuk melindungi dirinya dari yang lain. Unit akan mengkhawatirkan kelangsungan hidup mereka, dan kondisi yang mereka terima akan menentukan bagaimana perilaku mereka. Untuk mencapai tujuannya dan menjaga keamanan mereka, unit dalam kondisi anarki harus bergantung pada cara yang dapat mereka hasilkan dan pengaturan yang dapat mereka buat untuk diri mereka sendiri. Dan dalam kondisi anarki pula *self-help* merupakan prinsip yang mendasar untuk bertindak (Waltz, 1979). Salah satu kondisi yang disebabkan oleh struktur internasional yang anarki adalah munculnya berbagai ancaman dari luar negara.

Jika merujuk pada pernyataan Stephen Walt, hakikat sebuah ancaman terdiri empat indikator yang mungkin ditimbulkan oleh suatu negara. Empat indikator tersebut diantaranya adalah; 1) kekuatan agregat, 2) kedekatan, 3) kemampuan ofensif, dan 4) adanya niat untuk menyerang (Walt, 1985). Apabila melihat Cina yang agresif di Laut Cina Selatan, negara tersebut telah menimbulkan empat indikator ancaman menurut Walt.

Selama beberapa tahun terakhir ini, kepentingan nasional Cina telah menjadi terbuka untuk dibahas dan dapat difenisikan secara eksplisit. Setelah Xi Jinping mulai berkuasa pada 2013, ia menyampaikan pidato di Konferensi Pusat tentang Pekerjaan yang Berhubungan dengan Luar Negeri, mengumumkan perkembangan baru dalam kebijakan luar negeri Cina yang akan ia jalankan. Inti dari kepentingan nasional ini mencakup kedaulatan, integritas wilayah, dan pembangunan sosio-ekonomi yang



berkelanjutan. Laporan pada Kongres CCP ke-18 tahun 2012, panduan untuk lima tahun ke depan, menekankan pentingnya melindungi kepentingan dan hak kedaulatan Cina, dan tidak menyerah pada tekanan dari luar negaranya. Kongres CCP ke-18 juga mengklasifikasi ulang tentang Laut Cina Selatan sebagai kepentingan nasional inti. Xi Jinping juga menempatkan nasionalisme, patriotisme, dan kebanggaan, sebagai pusat kepemimpinannya. Seperti yang dikemukakan oleh Huang, Xi Jinping menyadari bahwa nasionalisme adalah gagasan yang kuat dalam masyarakat Cina (Sinaga, 2015).

Gagasan nasionalisme kemudian memunculkan rasa kepedulian Cina untuk semakin peduli atas kedaulatan dan kepentingan teritorialnya di wilayah Laut Cina Selatan. Aspek ekonomi juga mendorong kebijakan Cina dalam wilayah tersebut. Laut Cina Selatan merupakan jalur kehidupan yang strategis dan merupakan sumber daya ekonomi yang vital bagi Cina (Kuik, 2017). Laut Cina Selatan juga memiliki wilayah yang luas dengan mencakup seluas hampir satu setengah juta mil. Hal ini menjadi sangat penting bagi Cina tidak hanya dalam daerah penangkapan ikan semata, melainkan juga kaya akan potensi sumber daya energi dan kekayaan mineral yang besar. Selain itu, kawasan Laut Cina Selatan juga merupakan rute perdagangan tersibuk didunia yang mana akan menunjang perekonomian Cina. Seluruh kegiatan impor minyak Cina yang didatangkan dari Timur Tengah dan Afrika melewati Laut Cina Selatan (Kuik, 2017). Oleh karenanya, kepentingan Cina di wilayah tersebut sangatlah vital dikarenakan banyaknya potensi sumber daya yang terdapat di wilayah yang menjadi sengketa tersebut.

Sengketa Laut Cina Selatan adalah salah satu sengketa teritorial dan maritim paling kompleks di dunia saat ini. Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei memiliki klaim yang bertentangan di Laut Cina Selatan (Sison, 2018). Dari keenam negara diatas, Cina adalah salah satu negara yang dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya di wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Kebijakan luar negeri yang paling agresif yang dikeluarkan oleh Cina ketika negara tersebut mengeluarkan peta wilayah kedaulatan maritim yang dikenal dengan *nine dash line*. Kebijakan seperti ini sangat bertolak belakang dengan UNCLOS 1982. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-



Bangsa atau UNCLOS 1982 adalah kerangka hukum internasional utama yang menetapkan tatanan hukum untuk lautan dan samudra di dunia. Konvensi tersebut membahas berbagai masalah, dari pemberian yurisdiksi laut negara pantai dan mengamankan komunikasi internasional, hingga perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam pembukaan UNCLOS 1982, menyebutkan bahwa tujuannya adalah untuk berkontribusi pada penguatan perdamaian, keamanan, kerja sama dan hubungan persahabatan di antara semua negara sesuai dengan prinsip keadilan dan persamaan hak sesuai dengan Tujuan dan Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, 2020).

Topik ini tidak hanya membahas masalah tumpang tindih perbatasan yang terjadi dalam sengketa Laut Cina Selatan. Isu yang terjadi di Laut Cina Selatan lebih dari sekedar batas maritim antar negara dan agresivitas Cina. Namun, kedua isu tersebut tetap menjadi isu utama dalam permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan. Selain membahas dua isu tersebut, ternyata terdapat isu keamanan nontradisional yang terjadi di wilayah perairan Asia Tenggara. Malaysia adalah salah satu negara yang menjadi *claimant state* di wilayah Laut Cina Selatan. Malaysia juga merupakan negara yang berada di wilayah Asia Tenggara yang mendapatkan dampak dari kejahatan non tradisional yang terjadi hingga saat ini. Maka dari itu, pada penelitian ini tim penulis akan membahas bagaimana upaya kebijakan luar negeri dan upaya mitigasi yang dilakukan oleh Malaysia dalam menghadapi sengketa di Laut Cina Selatan dan masalah kejahatan non tradisional di perairan Asia Tenggara.

2. Pembahasan

2.1. Konsep Perang Asimetris dan Ancaman di Laut Cina Selatan (LCS).

Perang asimetris adalah perang antara pihak yang berperang yang kekuatan militernya relatif berbeda secara signifikan (tidak seimbang), atau yang strategi atau taktiknya berbeda secara signifikan. Ini biasanya perang antara tentara profesional yang berdiri dan pemberontak atau milisi gerakan perlawanan yang sering memiliki status kombatan yang melanggar hukum. Kepentingan Nasional Malaysia menganggap pembelaan kepentingan nasional sebagai dasar kedaulatan



dan kemerdekaannya. Sejalan dengan itu, tujuan utama kebijakan Pertahanan Negara adalah untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan dan wilayah Malaysia dari ancaman domestik dan luar negeri. Kepentingan geografis Malaysia dibagi menjadi berikut: Area inti;Kepentingan ekonomi lepas pantai; dan Perairan dan wilayah udara yang strategis. Pentingnya Selat Malaka karena merupakan salah satu jalur pelayaran internasional utama dan melayani hampir seluruh transportasi laut Timur-Barat. Hal tersebut juga menjadikan tuan rumah pelabuhan utama dan pusat bisnis Malaysia dan merupakan jalur transportasi untuk delapan puluh persen ekspor dan impor Malaysia. Malaysia secara eksplisit menganggap setiap perambahan ke Selat Malaka sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional, pertahanan dan kedaulatannya. Apalagi penguasaan Selat Malaka oleh kekuatan eksternal akan berdampak buruk pada kemakmuran ekonomi sebagian besar negara termasuk kekuatan besar. Selat tersebut berpotensi menjadi sumber sengketa bagi kekuatan eksternal sehingga menjadi "hotspot" konflik yang dapat berdampak negatif terhadap keamanan dan pertahanan Malaysia. Selat Singapura, yang sebagian berada di dalam wilayah perairan Malaysia, merupakan jalur air terpenting dan tersibuk di dunia. Selat Singapura tidak hanya penting untuk perdagangan internasional tetapi juga untuk perdagangan internal dan komunikasi laut antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Selat Singapura sangat penting bagi pertahanan maritim Malaysia dan seperti halnya Selat Malaka adalah salah satu jalur komunikasi laut strategis negara tersebut.

2.2. Isu dan Tantangan Diplomasi Pertahanan Malaysia di Laut Cina Selatan.

Peran dan fungsi diplomasi pertahanan bukan untuk melawan, tetapi untuk meminimalkan permusuhan, membangun CBM antar pihak, dan membantu dalam praktik jika ada bencana yang harus ditolong. Malaysia telah menerapkan diplomasi pertahanan ini tidak hanya melalui ADMM, tetapi juga SOM. Memiliki diplomasi pertahanan, memungkinkan negara-negara untuk membatasi aktivitas agresifnya dan juga perangkat "penyelamatan muka" yang sangat penting bagi negara kecil. Dari segi personel, kemampuan Malaysia terbatas. Proporsi personel



nomor satu di militer di angkatan bersenjata Malaysia kecil, karena 70-75% uangnya milik tentara, jadi sisanya dibagi antara angkatan udara dan angkatan laut. Dalam hal kemampuan nyata seperti senjata, dll juga terbatas. Karena Malaysia tidak siap secara militer, tidak bersedia diplomatis, dan tidak memiliki keinginan untuk berperang, maka sangat penting bagi Malaysia untuk lebih mengandalkan diplomasi, diplomasi pertahanan dan penguatan ekonomi mereka untuk menghindari konflik. Indonesia di sisi lain, meskipun memiliki kemampuan dan kemauan untuk berjuang, memiliki jenis perilaku moral kekuatan menengah di mana mereka menggunakan kekuatannya untuk berperilaku baik untuk meminimalkan rasa takut.

Malaysia percaya bahwa kepentingan ekonomi, hubungan ekonomi dapat mengikat negara bersama. Malaysia untuk beberapa waktu sekarang, telah mengusulkan apa yang disebut oleh kebijakan tetangga. Ini berarti berbagi ekonomi pembangunan "buah" ekonomi yang baik. Untuk itu, Malaysia telah mengembangkan strategi pembangunan ekonomi multilateral, baik di darat maupun di laut. Misalnya, dalam hal strategi pembangunan ekonomi dengan negara tetangga, Malaysia memiliki The SIJORI Growth Triangle yang meliputi Singapura, Johor (Malaysia) dan Riau (Indonesia). Di Laut Cina Selatan, atau di dekat perbatasan Filipina, Malaysia memiliki BIMP-EAGA yang merupakan Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur untuk mengalihkan kegiatan ekonomi dari ekstraksi sumber daya ke tingkat pemrosesan dan produksi bernilai tambah yang lebih tinggi, dengan fokus pada industri yang mengadopsi bersih dan teknologi hijau yang diciptakan oleh Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina.

2.3. Kebijakan dan Upaya Mitigasi Diplomasi Pertahanan Malaysia di Laut Cina Selatan

Salah satu permasalahan yang terjadi di perairan Asia Tenggara tidak hanya terbatas pada masalah Laut Cina Selatan saja, namun masalah Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan Laut Sulu merupakan permasalahan di kawasan Asia Tenggara. Empat wilayah perairan yang terletak di Asia Tenggara ini menjadi salah satu



wilayah paling berbahaya di dunia dalam hal perampokan bersenjata dan pembajakan. Pembajakan tidak hanya menjadi masalah di Asia Tenggara tetapi juga menjadi masalah bagi perdagangan maritim internasional. Asia Tenggara atau Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan maritim internasional yang sangat penting karena kapal-kapal yang datang dari timur ke barat dan dari barat ke timur melewati kawasan ini. Dengan kondisi geografis Laut Cina Selatan dan Selat Malaka yang telah merusak wilayah, banyak pulau, dan teluk menyebabkan banyak aktivitas bajak laut di sekitar wilayah tersebut.

Isu keamanan non-tradisional berikutnya adalah isu terorisme. Di Asia Tenggara ada kelompok teroris bernama Abu Sayyaf. Kelompok Abu Sayyaf berasal dari Filipina selatan sebagai akibat dari ketidakstabilan dan masalah keamanan yang kemudian berdampak pada munculnya kelompok dan aktivitasnya. Aktivitas mereka berada di perairan sekitar wilayah Sabah Malaysia dan di Filipina Selatan. Mereka mengancam akan menculik penduduk setempat, dan turis kemudian meminta uang tebusan jika ingin dibebaskan. Pada Januari 2020, militan Abu Sayyaf menculik 8 nelayan di lepas pantai Sabah, pihak Malaysia menyelamatkan beberapa dari mereka, yang ditawan. Isu selanjutnya terkait isu keamanan nontradisional adalah imigran gelap. Bagi Malaysia, isu ini menjadi isu besar karena sejak tahun 1980-an, isu migran ilegal menjadi isu sekuritisasi. Artinya, masalah migran ilegal di Malaysia merupakan masalah keamanan negara. Sabah merupakan daerah yang rawan kedatangan migran ilegal karena kedekatannya dengan Filipina Selatan yang sarat konflik. Akibat konflik di Filipina Selatan, warga Filipina pindah ke daerah yang dekat dengan Filipina Selatan. Faktor lainnya adalah kedekatan aspek hubungan sosial budaya masyarakat di kedua wilayah tersebut. Masalah terakhir adalah masalah penangkapan ikan. Isu penangkapan ikan telah menjadi isu keamanan non-tradisional karena dua alasan. Alasan pertama adalah perlindungan terhadap keamanan lingkungan dan yang kedua adalah sengketa yang timbul akibat penangkapan ikan dan juga dampak dari penangkapan ikan yang berlebihan akan berimplikasi pada keamanan. Negara-



negara di sekitar lingkaran Laut Cina Selatan tidak akan sepakat membentuk kerja sama pengelolaan ikan bersama. Dikhawatirkan kedepannya akan menimbulkan sengketa perbatasan antar negara.

2.3.1 Upaya Diplomasi Pertahanan ASEAN di Laut Cina Selatan

Diplomasi di bidang pilar APSC, Dilakukan melalui kerja sama pertahanan praktis menghadapi tantangan keamanan di ASEAN guna menciptakan lingkungan yang stabil dan damai. Asia sendiri dalam konteks diplomasi pertahanan sangat disambut baik oleh semua negara anggota karena hanya dengan cara inilah negara-negara Asean dapat mengungkapkan keinginan atau pendapatnya mengenai pertahanan dan keamanan kawasan khususnya dengan menggunakan ADMM. Di dalam ASEAN sendiri sebenarnya belum ada komunitas atau komunitas keamanan yang terbentuk, tetapi sudah ada diskusi-diskusi yang mengarah ke sana. Dan juga dalam praktiknya sudah ada ADM terkait diplomasi pertahanan yang merupakan wujud nyata dari definisi komunitas atau komunitas keamanan di kawasan ASEAN itu sendiri. Di ASEAN sendiri fan community berbeda dengan aliansi seperti NATO atau aliansi lainnya, hal ini harus ditekankan atau diingatkan karena jika negara-negara ASEAN membangun aliansi. Hal ini akan menjadi jebakan bagi ASEAN sendiri dimana harus jelas apa tujuan dari Aliansi dan terhadap siapa hal ini akan menimbulkan beberapa masalah termasuk kecurigaan di antara negara-negara anggota ASEAN sendiri tentang adanya aliansi.

Dalam prakteknya mengenai diplomasi pertahanan di Asia dapat kita lihat dari adanya beberapa kegiatan seperti first track dimana hal ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh negara dan kerajaan seperti Indonesia dan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dan Brunei dan lain-lain, kemudian trek kedua di mana ini melibatkan kerjasama beberapa faktor seperti misalnya universitas pertahanan di Indonesia dengan universitas di Malaysia kemudian adanya akademi militer di beberapa negara kemudian



adanya pihak dari pihak kampus atau dari stafnya dan terakhir jalur ketiga atau jalur terakhir melalui lembaga sipil oleh mengadakan seminar, forum tentang masalah keamanan.

Kemudian meskipun telah ada praktik diplomasi pertahanan dan juga terdapat beberapa dokumen dan juga realisasi diplomasi pertahanan di dalam ASEAN sendiri. Namun terdapat beberapa kelemahan dalam diplomasi pertahanan di Asean itu sendiri, seperti pertama adanya perbedaan kepentingan dari negara-negara anggota ASEAN itu sendiri kemudian adanya perbedaan tujuan nasional dan yang kedua adalah adanya sistem anarki atau prinsip dalam hubungan internasional, terutama dalam hubungan suatu negara dengan negara lain dimana kekuasaan tertinggi terletak pada negara itu sendiri. Hal ini berbeda ketika ada penutup mental organisasi seperti PBB dan Asean itu sendiri dimana ini adalah organisasi dari negara-negara yang menjadi anggota sehingga dalam mengambil keputusan sendiri kembali ke negara anggota seperti dalam hal ini di ASEAN sendiri ada musyawarah dan mufakat. dalam mengambil keputusan dan ini tergantung pada negara anggota ASEAN itu sendiri sehingga tidak ada organisasi resmi yang mengatur negara, bahwa negara anggota sendiri menentukan nasibnya sendiri. Dimana prakteknya tidak selalu fokus pada aturan baku atau perundang-undangan yang sudah terdokumentasi hal ini terkait dengan norma yang ada seperti di Asean sendiri ada yang namanya Asian Way ini adalah cara di dalam ASEAN dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang dilakukannya tidak menggunakan jalur formal melainkan jalur informal yang secara implisit dipahami oleh negara anggota dan tidak tersirat dalam aturan ASEAN atau piagam ASEAN tetapi hal ini dipahami oleh anggota ASEAN. ASEAN telah melakukan upaya besar dalam membangun kerangka kerja untuk keamanan, stabilitas dan perdamaian kawasan. ADMM telah muncul sebagai saluran penting untuk diplomasi pertahanan di kawasan, melalui kerjasama antara militer ASEAN, juga



memperluas kegiatannya dengan kekuatan non ASEAN. Sejauh menyangkut Laut Cina Selatan, ASEAN telah menyerukan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, dan sedang dalam proses menyimpulkan CoC yang akan memberikan pedoman untuk perilaku negara-negara di Laut Cina Selatan. Meskipun banyak kendala dan tantangan yang dihadapi dalam upaya tersebut, ASEAN sangat penting sebagai wahana untuk menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan.

2.3.2 Solusi Strategis Diploması Pertahanan Menghadapi Persoalan di Laut Cina Selatan

Peran diploması pertahanan dalam menghadapi persoalan di Laut Cina Selatan tentunya harus dilakukan secara bersama-sama dengan didukung oleh kekuatan kerjasama angkatan laut gabungan regional. Masalah, isu, aktor, panggung, semua sudah diketahui, jadi apa peran diploması pertahanan untuk mengurangi masalah, mengimplementasikan kebijakan? Angkatan bersenjata di negara-negara yang terlibat terlibat dalam upaya untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk angkatan bersenjata Malaysia dan negara ASEAN lainnya yang telah memainkan peran utama dalam pertahanan dan keamanan negara.

Peraturan dari ADMM Sebagai kerangka untuk membahas masalah keamanan dan pertahanan Mekanisme eksekusi. Diakui sebagai lembaga yang “berwibawa” di ASEAN untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan, dan berkaitan dengan sengketa Laut Cina Selatan, yang paling berwibawa karena ADMM dapat “berbicara dan membawa tongkat besar (*gunboat diplomacy*)”, diperkuat oleh fakta bahwa itu adalah suara 10 negara ASEAN yang didukung oleh militernya. ASEAN – CoC, meski masih dalam proses, namun gagasan bahwa itu ada dan akan keluar, memberi harapan bahwa masalah dapat dan akan diselesaikan secara damai. Melalui ADMM- yang relevan dan memiliki 'alat' untuk mengiringi diplomasinya. Pengklaim ASEAN vs. Cina : ASEAN harus lebih tegas dan



konsisten menyuarakan ketegasan Cina, sebagai pengingat jika tidak ada yang lain. Melalui ASEAN WAY sebagai jalan ke depan. Intervensi eksternal bukanlah solusi, oleh karena itu harus dihindari untuk mengurangi komplikasi yang mungkin timbul dari intervensi eksternal.

Diplomasi kapal perang sudah ketinggalan zaman dan ketinggalan zaman, jadi semoga negara-negara menyadari konsekuensi mengerikan dari penerapan prinsip "kekuatan itu benar." ASEAN secara geografis berada di pusat jalur perdagangan dunia, geopolitiknya kompleks, tetapi ASEAN telah berhasil menahan banyak bahaya yang timbul. Kerjasama fungsional telah diusulkan sebagai salah satu cara untuk mengurangi masalah di Laut Cina Selatan, yang akan saling menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat dan di luarnya. Namun, ini harus didahului dengan menyelesaikan masalah 'kedaulatan' - bagaimana menyelesaikan masalah ayam dan telur? Tampaknya hampir seluruh Laut Cina Selatan –sebagaimana 80% diklaim oleh Cina- terlibat dalam perselisihan tersebut.

Pentingnya kerjasama diplomasi pertahanan kawasan melalui DoC dan CoC yang diharapkan akan memberikan kontribusi untuk pengaturan yang lebih baik dari masalah keamanan maritim, dan perilaku negara tentang konflik, terutama dalam mengelola masalah Laut Cina Selatan, yang sebelumnya cukup tertahan pada klaim teritorial yang tumpang tindih, kini telah meluas dalam ruang lingkup dan aktor untuk mencakup tidak hanya masalah kedaulatan, tetapi juga persaingan kekuasaan.

Namun kita harus tetap optimis bahwa hal ini dapat diselesaikan secara damai dan diplomatis, karena alternatif solusi dari hambatan dalam mewujudkan perdamaian adalah dukungan dan bantuan dari organisasi yang mendukung stabilitas dan perdamaian di bawah bendera PBB melalui satuan peacekeeping operation khusus menjaga keamanan maritim dan perdamaian di Laut Cina Selatan



3. Kesimpulan

Sengketa Laut Cina Selatan saat ini menjadi salah satu sengketa teritorial dan maritim paling kompleks, karena melibatkan banyak negara yakni Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Cina memiliki kebijakan luar negeri yang paling agresif yakni dengan mengeluarkan peta wilayah kedaulatan maritim yang dikenal dengan *nine dash line*. Kebijakan seperti ini sangat bertolak belakang dengan UNCLOS 1982. Malaysia adalah salah satu negara yang memiliki masalah yang sangat dilematis karena kerjasama ekonomi Malaysia dengan Cina begitu erat dan sangat menguntungkan Malaysia, namun di sisi lain sengketa Laut Cina Selatan membuat Malaysia menahan diri dengan melaksanakan diplomasi lembut dengan berbagai pertimbangan demi hubungan kedua negara tetap terjaga. Isu yang terjadi di Laut Cina Selatan lebih dari sekedar batas maritim antar Malaysia dan Cina dan telah menjadi isu keamanan nontradisional yang terjadi di wilayah perairan Asia Tenggara. Malaysia sebagai salah satu negara yang menjadi *claimant state* di wilayah Laut Cina Selatan yang mendapatkan dampak dari kejahatan non tradisional yang terjadi hingga saat ini.

Upaya kebijakan luar negeri dan upaya mitigasi yang dilakukan oleh Malaysia dalam menghadapi sengketa di Laut Cina Selatan dan masalah kejahatan non tradisional di perairan Asia Tenggara nampaknya terus berjalan dengan dinamika yang sangat terkontrol. Malaysia mengambil sikap tidak meledak-ledak, melainkan bersikap *cool*, lembut dan mengedepankan diplomasi.

Kepentingan Nasional Malaysia adalah sebagai dasar kedaulatan dan kemerdekaannya yang sangat sesuai dengan tujuan utama kebijakan Pertahanan Negara yakni untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan dan wilayah Malaysia dari ancaman domestik dan luar negeri. Kepentingan geografis Malaysia terdiri dari area inti, kepentingan ekonomi lepas pantai, dan Perairan dan wilayah udara yang strategis. Selat Malaka karena merupakan salah satu jalur pelayaran internasional utama yang melayani hampir seluruh transportasi laut Timur-Barat. Malaysia menjadi tuan rumah pelabuhan utama dan pusat bisnis di selat malaka dan ini merupakan jalur transportasi untuk delapan puluh persen ekspor dan impor Malaysia. Oleh karena itu bila ada perambahan



ke Selat Malaka maka itu sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional, pertahanan dan kedaulatannya.

Dalam menghadapi isu keamanan di Laut Cina Selatan, Malaysia untuk lebih mengandalkan diplomasi pertahanan dan penguatan ekonomi mereka untuk menghindari konflik, karena Malaysia percaya bahwa kepentingan ekonomi dan hubungan ekonomi dapat mengikat negara menjadi bersahabat. Malaysia sangat mendukung diplomasi di bidang pilar APSC dan selalu mendukung kerja sama pertahanan praktis menghadapi tantangan keamanan di ASEAN guna menciptakan lingkungan yang stabil dan damai, khususnya dengan menggunakan ADMM sebagai sarana diplomasi pertahanan yang ampuh. Dengan jalan ini maka permasalahan yang terjadi di perairan Asia Tenggara termasuk masalah Laut Cina Selatan, masalah Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan Laut Sulu akan dihadapi bersama dalam wadah ASEAN karena empat wilayah perairan tersebut menjadi salah satu wilayah paling berbahaya di dunia dalam hal perampokan bersenjata dan pembajakan.

Malaysia menekankan bahwa kerjasama Angkatan bersenjata di negara-negara ASEAN akan memainkan peran utama dalam pertahanan dan keamanan kawasan. ASEAN yang “berwibawa” bersama ADMM dapat “berbicara dan membawa tongkat besar (*gunboat diplomacy*)”, apalagi suara 10 negara ASEAN yang didukung oleh militernya menjadikan ASEAN diperhitungkan oleh Cina. Gagasan ASEAN – CoC memberi harapan bahwa masalah dapat dan akan diselesaikan secara damai. Melalui ADMM, ASEAN harus lebih tegas dan konsisten menyuarakan ketegasan terhadap Cina.

Sebagai penutup dapat dikatakan di sini bahwa kerjasama diplomasi pertahanan kawasan melalui DoC dan CoC diharapkan akan memberikan kontribusi untuk pengaturan yang lebih baik dari masalah keamanan maritim, dan perilaku negara tentang konflik, terutama dalam mengelola masalah Laut Cina Selatan, yang sebelumnya cukup tertahan pada klaim teritorial yang tumpang tindih, kini telah meluas dalam ruang lingkup dan aktor untuk mencakup tidak hanya masalah kedaulatan, tetapi juga persaingan kekuasaan.



Daftar Pustaka

- Kegley, J. &. (1999). *American Foreign Policy*. California: Thomson.
- Kuik, C.-C. (2017). Explaining the Contradiction in Cina's South Cina Sea Policy: Structural Drivers and Domestic Imperatives . *Cina and International Journal*, 169.
- Sinaga, L. C. (2015). Cina's Assertive Foreign Policy in South Cina Sea under Xi Jinping: Its Impact on United States and Australian Foreign Policy . *Journal of ASEAN Studies* , 133-149.
- Sison, M. P. (2018). Universalizing the Law of the Sea in the South Cina Sea Dispute. *Ocean Development & International Law*, 157-175.
- United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982. (2020, November 2). *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*. Retrieved November 25, 2020, from Oceans and Law of the Sea United Nations : https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
- Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. *International Security*, 3-43.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics* . California: Addison-Wesley Publishing Company.